

Polisi Telusuri Kasus Uang Kuliah UNM

“Saya akan datang memenuhi panggilan itu.”

MAKASSAR — Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat tengah menelusuri uang sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) mantan mahasiswa penyetaraan Fakultas Ilmu Keolahrgaan Universitas Negeri Makassar (UNM). Penelusuran ini berkaitan dengan adanya dugaan penipuan oleh empat pejabat kampus, sehingga ijazah alumnus tidak dikeluarkan.

Kepala Satuan Reserse Ekonomi Polda Sulawesi Selatan dan Barat Ajun Komisaris Besar Deni Hermans mengatakan pengusutan sedang berjalan. Rencananya, penyidik menyita uang senilai Rp 117 juta. Uang tersebut diserahkan Abraham, salah satu dari 80 mahasiswa, kepada Syatir Mahmud, yang

saat itu menjabat Kepala Biro Administrasi dan Akademik UNM.

“Awalnya kami ingin menyita uang itu. Karena prosedurnya panjang, untuk sementara kami hanya memeriksa para terlapor,” ujar Deni kemarin. Dalam kasus ini, terjadi kekeliruan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan penerima anggaran. “Mantan kepala biro tidak memiliki daftar nama-nama mahasiswa yang membayar.”

Sebelumnya, penyidik telah menyita uang sebesar Rp 17 juta dari tangan Abraham Razak, salah satu tersangka dalam perkara ini. Uang tersebut adalah uang pendaftaran yang dikumpulkan dari mahasiswa penyetaraan. Jumlah uang pen-

daftar baru itu sebesar Rp 21 juta. Beberapa orang dari 80 mahasiswa tersebut ada yang belum membayar.

Kepala Biro Administrasi dan Akademik UNM Kamaruddin kemarin mendatangi penyidik kepolisian. *Tempo* belum memperoleh penjelasan mengenai maksud kedatangan Kamaruddin tersebut. Deni enggan mengatakan materi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Pembantu Rektor Bidang Akademik Sofyan Salam membenarkan adanya pemanggilan polisi itu. Penyidik menjadwalkan Sofyan diperiksa besok. “Saya kira pemanggilan itu wajar kepada siapa saja. Saya akan datang memenuhi panggilan itu,” ujar guru besar Fa-

kultas Seni dan Desain ini.

Sofyan keberatan atas rencana polisi menyita uang pembayaran senilai Rp 117 juta. Menurut dia, uang tersebut tidak bisa disita lantaran telah tersimpan di bank. “Yang akan kami perlihatkan nantinya adalah bukti-bukti secara administratif,” ujarnya.

Mantan direktur Pascasarjana ini menambahkan, selain faktor administratif, kasus ini mencuat karena ada masalah di akademik. Alumni penyetaraan yang tidak menerima ijazah ditengarai juga bermasalah dalam proses perkuliahan. “Tim verifikasi dari Fakultas Ilmu Keolahrgaan belum merampungkan penelusuran masalah tersebut.”

● ABDUL RAHMAN

Polisi Tak Temukan Kerusakan Kantor PPP

MAKASSAR — Kepolisian Resor Kota Besar Makassar tidak menemukan adanya perusakan kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Batu Putih. Kantor tersebut memang akan direnovasi beberapa bagiannya sehingga ada yang dibongkar, bukan dirusak sekelompok orang akibat kisruh di internal partai itu. “Anggota kami ke sana tidak menemukan ada perusakan,” ujar Kepala Polres Kota Besar Makassar Komisaris Besar Muhammad Nur Samsul kemarin.

Nur Samsul menanggapi Ketua PPP Makassar Mardju Chair, yang melaporkan dugaan perusakan kantor tersebut. Laporan Mardju yang datang pada Minggu malam lalu menyebutkan bahwa Arifuddin Lewa, pelaksana tugas PPP Makassar, mengerahkan massa untuk merusak kantor sekretariat partai. “Kami tetap menerima laporan tersebut. Karena tidak ada perusakan, kemungkinan kami akan mempertemukan kedua belah untuk mencari solusi,” kata Nur Samsul.

Rencana polisi mempertemukan kedua belah pihak ditanggapi dingin oleh Mardju. Dia mengaku akan berdiskusi dengan pengurus sebelum memenuhi pertemuan itu. “Saya akan bicarakan dulu dengan pengurus lainnya karena laporan saya bukan pribadi,” ucapnya.

Mardju juga mengatakan tindakan Arifuddin itu diketahui sejumlah pengurus. Pengaduannya ke polisi atas permintaan sejumlah pengurus anak cabang PPP.

“Mereka merusak jendela, pintu, dan mengambil arsip penting di kantor sekretariat,” ujar dia.

Adapun Arifuddin mengaku tidak merusak kantor partai berlandaskan Ka’bah tersebut. Kedatangannya ke sekretariat untuk melakukan perbaikan. Ia mengajak enam tukang untuk memperbaiki gedung. “Jadi mereka bukan preman. Mereka adalah tukang yang saya minta tolong untuk membersihkan dan memperbaiki sekretariat,” ujarnya.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar ini menjelaskan memiliki tanggung jawab memperbaiki kantor sekretariat. Dia mendapat surat keputusan dari dewan pimpinan wilayah sebagai pelaksana tugas. Laporan dugaan perusakan itu, menurut Arifuddin, telah mencemarkan nama baik dan membuat perasaan tidak enak. Dia akan melayangkan laporan balik ke polisi.

Kepengurusan PPP Makassar mengalami dualisme kepemimpinan. Di satu sisi, Mardju Chair mengklaim sebagai ketua yang sah berdasarkan surat keputusan dari pengurus pusat. Namun belakangan, PPP Sulawesi Selatan mengangkat Arifuddin Lewa sebagai pelaksana tugas.

● ABDUL RAHMAN



FAHMI ALI (TEMPO)

Nelayan di Mariso

Nelayan di kawasan padat penduduk di Kecamatan Mariso tampak sedang beraktivitas kemarin. Anggaran pemberantasan kemiskinan di Sulawesi Selatan naik 200 persen. Anggaran pada 2010 sebesar Rp 300 miliar menjadi Rp 500 miliar pada 2011. Adapun data jumlah penduduk miskin sebanyak 931 ribu jiwa.

Demo di Kantor Bupati Bikin Linda Ngeri

Linda kesal ketika gurunya membatalkan latihan mengerjakan soal ujian. Di depan gedung sekolahnya, gadis 17 tahun ini duduk termenung. Tangan kanannya menopang dagu, menunggu hiruk-pikuk massa di depan sekolahnya mereda.

Kemarin, pagar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Gowa, tempat Linda bersekolah, ditutup rapat sebelum jam sekolah bubar. Langkah ini untuk mencegah imbas unjuk rasa di kantor Bupati Gowa. “Saya kecewa dengan mereka yang demo. Ada yang masuk ke halaman sekolah sambil membawa senjata

tajam, meledakkan petasan, dan melempar batu,” kata Linda.

Ratusan orang yang mengatnamakan Aliansi Masyarakat Gowa itu berunjuk rasa ke kantor bupati dan berbuntut bentrokan dengan pegawai pemerintah. Mereka mempersoalkan kepemimpinan Bupati Ichsan Yasin Limpo, yang diduga berijazah palsu.

Aksi ini membuat seluruh murid sekolah ketakutan. Para guru yang tengah mengajar terpaksa menyudahi dan meminta siswanya segera pulang ketika terdengar suara di atap sekolah seperti hujan batu.

Lokasi sekolah itu dengan kan-

tor bupati memang berdekatan. Massa dari berbagai arah melemparkan batu dan kayu. Bukan hanya murid sekolah yang ketakutan. Warga sekitar juga khawatir menjadi sasaran amuk massa.

“Belajar matematika tadi (kemarin) belum selesai, guru minta kami segera pulang karena situasinya sangat tegang,” kata Linda.

Ia berharap unjuk rasa sambil menenteng senjata tajam itu tidak terulang. Apalagi dipamerkan di depan siswa. Mereka ngeri melihat massa beringas. Pendemo maupun yang menentang demo mestinya sadar bahwa di sekitar-

nya ada kegiatan belajar-mengajar. “Saya benar-benar takut,” kata Siska, teman sekelas Linda.

Siska berharap polisi berjaga di depan sekolah agar tidak dijadikan sasaran massa. Ada ancaman dari pengunjuk rasa bahwa mereka akan berdemo terus-menerus. “Padahal masih banyak bahan bimbingan yang harus kami ikuti untuk persiapan ujian nasional,” keluh Siska.

Selain SMK Negeri Gowa, di sekitar kantor bupati ada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gowa dan Sekolah Teknik Pembangunan Gowa. Para siswanya kini

sedang tekun belajar untuk menghadapi ujian.

Sejumlah perkantoran juga beroperasi di sini, seperti kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gowa, kantor Dinas Pekerjaan Umum Gowa, serta gedung Dewan. Pusat Pemerintah Kabupaten Gowa juga menjadi jalur penghubung ke wilayah lain, seperti Takalar. Terdapat empat jalur yang menjadi akses jalan poros Masjid Raya Syekh Yusuf. Akses ini menghubungkan Jalan Tumanurung, satu-satunya jalur menuju poros Sungguminasa ke Kabupaten Takalar. ● SAHRUL